

TAJUK RENCANA

Netralitas Aparat dalam Pemilu

PEMILIHAN Umum (Pemilu) 2024 kian dekat. Saat ini sudah memasuki masa kampanye. Para kandidat, baik capres-cawapres maupun calon anggota legislatif (DPD RI, DPR RI dan DPRD) sibuk mendekati masyarakat dengan tujuan satu, agar pada 14 Februari nanti memilihnya. Berbagai alat peraga kampanye (APK) juga mewarnai berbagai tempat-tempat strategis.

Salah satu hal penting yang banyak disorot saat ini adalah netralitas aparat (aparat sipil negara atau ASN, TNI dan Polri) dalam Pemilu 2024, baik mulai sebelum masa kampanye, selama masa kampanye maupun saat pencoblosan dan penghitungan surat suara nanti. Sorotan ini cukup logis, karena personel aparat adalah manusia biasa. Bagi ASN, dia juga pemilih dan mungkin saja dalam mendukung peserta Pemilu mempunyai emosional tertentu. Untuk aparat TNI dan Polri, mereka tidak mempunyai hak pilih. Tapi bisa jadi juga punya harapan agar calon tertentu terpilih. Bisa jadi ia lantas menyampaikan harapannya kepada orang lain, termasuk kepada anggota keluarganya yang juga pemilih dalam Pemilu.

Netralitas aparat memang harapan kita semua. Para petinggi negeri ini sudah menyampaikan komitmennya untuk menciptakan aparat yang netral. Misalnya Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin perlu meminta agar netralitas pemilu dapat terus dijaga oleh para aparat negara. Kita memang meminta supaya di lapangan para petugas kita, pelaksana kita, baik dari TNI, Polri, maupun dari ASN itu harus menjaga netralitas. Komitmen kita bersama, ucap Wapres.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto SE MSI dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sudah melaksanakan penandatanganan netralitas TNI-Polri dalam mengamankan Pemilu 2024. Ada empat point komitmen TNI-Polri untuk menciptakan Pemilu Tahun 2024 yang demokratis antara lain : Menjaga

dan menegakkan prinsip netralitas; Menghindari konflik kepentingan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu; Bersama-sama melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan politik uang; Saling bersinergi untuk menjaga kondusifitas penyelenggaraan Pemilu.

Sebagaimana diberitakan KR Kamis (28/12) kemarin, Kapolri menegaskan, seluruh personel Polri mulai pucuk pimpinan hingga pelaksana tugas lapangan terikat dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Kapolri juga mempersilakan masyarakat untuk melaporkan bila ada personel Polri yang kedapatan melanggar ketentuan netralitas. Jika ada personel yang terbukti tidak netral silakan dilaporkan melalui berbagai pengaduan yang ada beserta bukti-buktinya dan pasti akan kami tindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, kata Sigit.

Hanya saja terkait pelaporan pelaksanaannya tidak semudah yang diharapkan. Misalnya masyarakat mengetahui ada personel aparat atau anggota keluarganya yang juga pemilih dalam Pemilu. Netralitas aparat memang harapan kita semua. Para petinggi negeri ini sudah menyampaikan komitmennya untuk menciptakan aparat yang netral. Misalnya Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin perlu meminta agar netralitas pemilu dapat terus dijaga oleh para aparat negara. Kita memang meminta supaya di lapangan para petugas kita, pelaksana kita, baik dari TNI, Polri, maupun dari ASN itu harus menjaga netralitas. Komitmen kita bersama, ucap Wapres.

Untuk itu harus dipastikan keselamatan pelapor. Kalau ada laporan yang tidak disertai bukti, namun sangat mungkin terjadi, maka harus ditindaklanjuti. Netralitas aparat memang perlu terus dijaga dan diawasi, agar Pemilu dapat berjalan secara jujur (*fairplay*) dan adil antara calon atau parpol yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa di lingkungan birokrasi pemerintahan. □-d

Ajaran Politik Kemanusiaan Gus Dur

SUDAH 14 tahun KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meninggalkan kita. Wafat pada 30 Desember 2009. Namun, sampai saat ini ajaran kemanusiaan masih saja 'hidup', bahkan semakin merajalela. Kajian kemanusiaan ala tokoh Muslim yang pernah menjabat sebagai Presiden RI keempat ini semakin hari semakin menarik saja. Kata-kata Gus Dur yang cukup relevan, bahkan menjadi tema Haul pada Tahun 2018, yakni "Yang Lebih Penting dari politik adalah Kemanusiaan".

Pada dasarnya, politik adalah mulia. Politik menjadi kendaraan mengumpulkan ide-ide cemerlang dalam rangka memajukan sebuah bangsa. Namun demikian, kata-kata Gus Dur itu diucapkan tak lepas dari hiruk pikuk politik yang seakan beralih fungsi. Politik dijadikan sebagai kendaraan dalam memenuhi syahwat kekuasaan satu orang atau kelompok tertentu. Upaya yang dilakukan pun sering kali menabrak tatanan sosial dan kemanusiaan.

'Dipaksa'

Lihatlah! Fenomena perpolitikan kita saat ini seperti apa? Para kandidat pemimpin dan wakil rakyat banyak yang tega menghujat orang lain. Mereka mengobrol janji yang bahkan tidak realistis untuk dilakukan. Rakyat jelata 'dipaksa' memilih kucing dalam karung dengan disuap dengan selembap kaos atau nominal uang Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu. Masyarakat ditakut-takuti, jika dirinya tidak mencoblos dirinya, maka akan ada 'dampak negatif' yang merugikan dirinya atau bahkan bangsanya. Begitu seterusnya.

Padahal apa yang terjadi? Para kandidat pemimpin ataupun wakil rakyat yang bermulut manis anyu untuk meraih simpati rakyat agar memilih dirinya. Ketika sudah menjadi pemimpin atau wakil rakyat, program-program yang mestinya untuk kemakmuran rakyat justru dipergunakan untuk kepen-

Anton Prasetyo

tingan pribadi atau kelompoknya.

Perjalanan politik ambisius untuk menggapai kekuasaan dalam rangka menindas seperti inilah yang tidak berkemanusiaan. Maka sudah saatnya ajaran politik kemanusiaan Gus Dur perlu dikaji dan diduplikasi. Perjalanan politik Gus Dur dimulai jauh sebelum ia diangkat sebagai Presiden RI. Sejak sebelum, saat menjabat, hingga setelah



KR-JOKO SANTOSO

menjadi presiden, Gus Dur selalu mengajarkan politik berkemanusiaan. Bahkan meski ia merupakan orang besar dan berasal dari keluarga orang berpengaruh, ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, selalu berpihak kepada wong cilik. Gus Dur mengajarkan bahwa jabatan bukanlah segala-galanya. Jabatan tidak perlu diperjuangkan hingga mati-matian.

Bagi pelaku sejarah politik saat ini, ajaran politik kemanusiaan Gus Dur ini mesti menjadi kaca benggala. Mereka bisa meniru nilai-nilai positif kemanusiaan. Sementara, bagi generasi muda dan

anak-anak, ajaran politik kemanusiaan Gus Dur ini juga harus lebih diperhatikan. Para orang tua mesti menilai betapa Gus Dur bisa menjadi pribadi yang begitu baik seperti ini tak lepas dari modal dasar yang ada pada dirinya sejak belia. Didikan keluarga dan lingkungan pesantren, secara tidak langsung membentuk menjadi pribadi yang taat beragama, berwawasan agama luas, dan mandiri serta kesederhanaan.

Dampak Positif

Di balik ajaran politik Gus Dur yang berkemanusiaan dan memiliki dampak positif besar. Bahkan hingga jauh hari setelah dirinya wafat, tak dapat dilepaskan dari kepribadian dan keluasan ilmu pengetahuan serta pengalamannya. Bermula dari sinilah, para orang tua saat ini mesti mengarahkan anak-anaknya untuk bisa mencetak generasi yang tidak hanya cerdas pikiran namun juga cerdas hati dan berwawasan luas.

Dengannya, ia akan menjadi pribadi yang siap memimpin masa depan. Kesiapan yang ada pada dirinya tentu tidak hanya untuk kebutuhan pemenuhan nafsu pribadi dan golongan saja namun untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Endingnya, seluruh rakyat Indonesia bisa merasakan kemanfaatan dari apa yang telah diperjuangkan. □-d

*) **Anton Prasetyo MSos**, Pendiri Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ) Baitul Hikmah, Alumnus Ponpes Nurul Ummah Yogyakarta

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan foto-copy identitas. Terimakasih.

Politik, Etika, dan Politisasi Etika

Rachmanto

lakunya. *Kedua*, etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral (kode etik). *Ketiga*, etika sebagai ilmu mengenai baik dan buruk (Bertens: 2007).

Diskusi mengenai etika memang harus terus digaungkan. Tujuannya agar masyarakat semakin memahami urgensi etika yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Sikap permisif terhadap merosotnya etika perlu dihindari. Jika dibiarkan, akan menimbulkan kerusakan moral di masyarakat. Kehidupan menjadi kacau balau karena masing-masing merasa berhak bertindak berdasarkan keinginan dan kepentingan pribadi saja, tanpa memikirkan apakah tindakannya pantas dilakukan atau tidak.

Upaya mengesampingkan etika tidak boleh terjadi. Oleh sebab itu, sikap kritis masyarakat untuk menguliti perilaku para politisi yang akan bersaing di pemilu perlu diperkuat. Tujuannya untuk mendapatkan wakil rakyat maupun pemimpin yang bersih dan terpecah. Rakyat tidak boleh memilih politisi yang bermasalah secara etika.

Rakyat memiliki pengalaman panjang memilih orang yang terlihat baik tetapi sesungguhnya memiliki etika yang jelek. Seperti pemimpin yang mencitrakan diri bersih namun akhirnya dihukum karena korupsi. Pemimpin yang berjanji bekerja untuk rakyat namun kenyataannya bekerja untuk memperkaya diri sendiri. Rakyat tidak boleh tertipu berkali-lagi oleh politisi yang tidak berintegritas.

Senjata

Namun, upaya untuk menjun-

jung tinggi etika dihadapkan pada masalah baru yaitu politisasi etika oleh para politisi. Masing-masing menggapai kubunya sebagai pihak yang menjunjung tinggi etika, sementara pihak lawannya tidak beretika. Terminologi etika menjadi senjata untuk menikam dan menjatuhkan pihak lain yang berbeda, dan bukan upaya menjernihkan persoalan etika.

Aktor-aktor politik berupaya memanipulasi isu etika untuk kepentingan pribadi. Meskipun begitu, masyarakat kini sudah semakin sadar dan kritis dengan segala tindak tanduk para politisi. Kita semakin mudah mendapatkan informasi yang valid sekaligus objektif sebagai bahan pertimbangan untuk memilih. Semoga kita kelak memperoleh pemimpin yang menjunjung tinggi etika dalam setiap perbuatan dan kebijakannya. □-d

*) **Rachmanto**, Kandidat Doktor Program Studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana UGM

Pojok KR

Waspadai cuaca ekstrem sepekan.
-- **Semoga tidak menimbulkan bencana.**

Langgar kode etik, Firli disanksi berat.
-- **Tidak punya alasan untuk menolal.**

KPU evaluasi debat kedua.
-- **Selanjutnya harus lebih baik.**

Beraba

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Hujan Telah 'Hilang Lagi' di DIY

BULAN lalu (Oktober - November), bisa dikatakan kita menikmati hujan yang menyapa, walau tidak merata. Hujan ada yang deras namun ada yang hanya gerimis, ada yang dengan angin bahkan ada yang mengakibatkan longsor. Banyak pihak sudah merasa sangat senang dan bersyukur, karena hujan yang jatuh dari langit (waktu itu) umumnya cukup deras.

Pemikiran 'wong Jawa' Desember adalah *gedhe-gedhene sumber*. Sehingga harapannya, hujan lebat akan turun di bu-

lan Desember ini. Namun hingga mau berakhir, ternyata Desember bisa dikatakan tidak ada hujan. Bahkan, hujan telah 'hilang lagi' dari DIY.

Apa yang terjadi? Bagaimana informasi BMKG? Tidak semua warga 'bisa membaca' informasi BMKG yang disiarkan via medsos. Alangkah baik jika media cetak, online dan juga elektronik menyampaikan informasi ini dengan bahasa yang populis, dimengerti masyarakat. □-d

*) **Vivi MA**, *Mrican Jl Gejayan Sleman*

Petani Menjerit Karena Hujan Pergi

SETELAH membiarkan tanah sawah cukup lama, kami merasa bersyukur ketika hujan mulai turun, bulan lalu. Orang tua pun merasa senang dan mengajak menggarap sawah yang sempat teronggok dan kekeringan, jika kami libur kerja. Kami bersyukur sawah yang ada ini bisa teratasi masalah airnya. Dan kami bisa menanam padi.

Bagaimana pun, bapak sebagai petani tradisional seperti tidak *sreg* jika tidak menanam padi. Dan tiap Minggu, anak-anaknya membantu di sawah. Namun apa daya, hujan telah hilang lagi dan padi kami baru satu setengah bulan tertanam. Ya Allah, ini sangat berat bagi kami. □-d

*) **Jiyono**, *Mejing Bangunjwo Bantul*

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwati, Benny Kusumawati, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afifati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Nour Rochmans. **Fotografer:** Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrky23@yahoo.com, iklankrky13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)...Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi DI s/d S1, Permikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)